



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup, hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SYAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 49

RENCANA KERJA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
 PENDAHULUAN

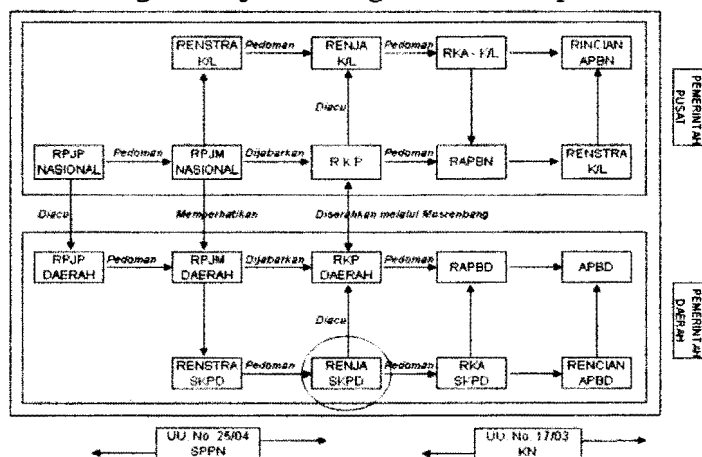
1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang ADIPURA;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/1369/II/ Bangda tanggal 25 Maret 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah:

1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan pada Tahun 2022 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan serta menyusun anggaran pelaksanaan yang akan dilakukan Tahun 2022 sehingga mendukung tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan yang ada dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup 2020 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan dari capaian kinerja program/ kegiatan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini, ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan antara lain Kegiatan Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman. Capaian tidak memenuhi target yang telah direncanakan karena disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya kegiatan tatap muka yang berimplikasi pada belanja barang dan jasa.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan. Pemenuhan program ini meliputi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional selama kurun waktu 1 tahun anggaran dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan pada program ini terdapat pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 yang melarang berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak sedangkan kegiatan tersebut bersifat penyuluhan atau sosialisasi.

Sedangkan untuk realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 disebabkan karena ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 meningkat sehingga permohonan pelayanan perijinan harus tetap dilaksanakan atau tidak dapat ditolak.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan yang terdapat pada program ini, capaian realisasi kegiatannya tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel ke perusahaan dan UPT Lab juga tidak menerima sampel yang beresiko.

5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Keseluruhan capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan.

6. Program Penataan Lingkungan Hidup

Keseluruhan capaian pada kegiatan pada program ini telah memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan. Untuk Kegiatan

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau pada tahun ini tidak dapat dilakukan penataan atau pembangunan baru karena dana difocusing sehingga hanya dapat dilakukan pemeliharaan RTH.

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu Kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan karena jumlah kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke DLH tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, setiap pengaduan yang masuk harus ditangani selama memenuhi peraturan perundangan.

Sedangkan untuk realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan penghargaan yang diterima oleh DLH. Pada tahun 2020 DLH hanya menerima 1 penghargaan lingkungan yaitu penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan selama pandemi. Selain itu, adanya kebijakan dari KLHK bahwa tidak ada penilaian Adiwiyata Nasional, Adipura dan Kader Lingkungan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi dampak pandemi Covid-19 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia dan Pengurangan belanja APBD Kab. Pasuruan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 terkait target kinerja sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 terkait pendanaan sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung realisasi kegiatan pada program-program tersebut, maka kebijakan/perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akibat pandemi Covid-19, terkait dengan kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau penyuluhan maupun kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilakukan pembatasan tatap muka dan diganti dengan pembinaan kegiatan melalui daring;
2. Permohonan rekomendasi terkait dengan Limbah B3 akan menyesuaikan dengan prosedur pemrosesan pemberian rekomendasi, yang semula dalam satu hari pelaksanaan verifikasi lapangan hanya untuk 1 (satu) pemohon dan langsung dibuatkan berita acara (pelaksanaan insitu), berubah menjadi 1 hari untuk 2 pemohon dengan berita acara dibuat di kantor pada hari berikutnya;
3. Dilakukan peningkatan kualitas data meliputi validasi dan pendekatan data spasial agar nilai IKLH dapat mengalami peningkatan;

4. Peningkatan perencanaan antara lain Sumber Daya Manusia dan anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan agar pelanggaran-pelanggaran lingkungan dapat menurun dan terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat;
5. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA, pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan terus ditingkatkan agar kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun;
6. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kota yang bersih, teduh dan nyaman dalam wadah Program Adipura tetap akan terus dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

Pada Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan telah melaksanakan 7 program dan 34 kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
A	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	Rp 2.188.162.588	Rp 1.881.667.599	85,99%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Rp 246.600.000	Rp 167.020.024	67,73%
2	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Rp 239.520.000	Rp 233.175.000	97,35%
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 46.325.500	Rp 40.475.000	87,37%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 39.407.000	Rp 30.167.000	76,55%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.134.000	Rp 13.138.250	54,44%
6	Penyediaan Peralatan dan Perleng. Kantor	Rp 21.262.500	Rp 13.952.500	65,62%
7	Penyediaan Makanan & Minuman	Rp 20.200.000	Rp 14.720.000	72,87%
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp 108.122.588	Rp 107.813.625	99,71%
9	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp 1.278.650.000	Rp 1.145.118.200	89,56%
10	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp 110.350.000	Rp 93.663.000	84,88%
11	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Rp 53.591.000	Rp 22.425.000	41,84%
B	PROGRAM PENINGK. SARANA & PRASARANA APARATUR	Rp 245.563.000	Rp 239.365.093	97,48%
12	Pemeliharaan R/B Gedung Kantor	Rp 0	Rp 0	0%
13	Pemeliharaan R/B Kend. Dinas/Ops	Rp 245.563.000	Rp 239.365.093	97,48%
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 7.334.637.276	Rp 7.173.409.380	97,80%
14	Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp 880.986.912	Rp 831.632.340	94,40%
15	Peningk. Operasi dan Pemel. Sarpras Persampahan	Rp 5.680.316.500	Rp 5.616.333.250	98,87%
16	Peningk. Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Rp 100.724.800	Rp 98.702.000	97,99%
17	Peningk. Pesan Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 650.188.200	Rp 604.326.640	92,95%
18	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Rp 22.420.864	Rp 22.415.150	99,97%

D	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH	Rp 1.125.807.772	Rp 923.806.605	82,06%
19	Operasional Laboratorium Lingkungan	Rp 665.530.000	Rp 553.850.000	83,22%
20	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 12.600.000	Rp 6.489.750	51,51%
21	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 105.294.157	Rp 21.253.240	20,18%
22	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 342.383.615	Rp 342.213.615	99,95%
E	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Rp 21.508.427.926	Rp 18.749.354.367	87,17%
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien)	Rp 575.413.500	Rp 502.609.100	90,48%
24	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Air)	Rp 100.000.000	Rp 96.296.250	96,30%
25	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara)	Rp 121.323.600	Rp 109.284.050	90,08%
26	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri)	Rp 256.262.900	Rp 60.808.920	23,73%
27	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pembangunan/ Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir)	Rp 19.455.427.926	Rp 16.973.644.547	87,24%
28	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan/ Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	Rp 1.000.000.000	Rp 988.711.500	98,87%
F	PROGRAM PENATAAN LH	Rp 3.035.285.100	Rp 2.955.583.200	97,37%
29	Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Rp 269.263.300	Rp 268.206.250	99,61%
30	Kajian Dampak Lingkungan Hidup	Rp 64.443.500	Rp 59.328.500	92,06%
31	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Rp 2.701.578.300	Rp 2.628.048.850	97,28%
G	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 248.870.510	Rp 216.320.614	86,92%
32	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Rp 81.391.010	Rp 71.609.341	87,98%
33	Penegakan Hukum Lingkungan	Rp 39.972.500	Rp 28.205.300	70,56%
34	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rp 127.507.000	Rp 116.506.000	91,37%
	BELANJA LANGSUNG	Rp 35.686.754.172	Rp 32.139.506.885	90,06%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 7.663.066.000	Rp 7.571.519.155	98,81%
	TOTAL	Rp 43.349.820.172	Rp 39.711.026.040	91,61%

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2020
Kabupaten Pasuruan

OPD: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 05 02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet	25 rekening	25 rekening	40 rekening-bulan	40 rekening-bulan	100%	-	-	-
2 05 02 01 07	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	25 orang	25 orang	34 orang-bulan	34 orang-bulan	100%	-	-	-
2 05 02 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	10 unit	-	17 unit	9 unit	52,94%	-	-	-
2 05 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	60 jenis	60 jenis	27 jenis	22 jenis	81,48%	-	-	-
2 05 02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan	15 jenis	15 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	-	-	-
2 05 02 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	42 jenis	42 jenis	23 jenis	20 jenis	86,95%	-	-	-

2 05 02 01 17	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	900 kotak	900 kotak	720 kotak	619 kotak	85,97%	-	-	-
2 05 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	12 org/kali	12 org/ kali	12 org/kali	14 org/kali	116,66%	-	-	-
2 05 02 01 19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar	52 orang	52 orang	51 orang	51 orang	100%	-	-	-
2 05 02 01 22	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	300 orang	-	300 orang	300 orang	100%	-	-	-
2 05 02 01 23	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	8 dokumen	-	8 dokumen	5 dokumen	62,5%	-	-	-
2 05 02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpeliharanya dan Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 02 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor	-	11 jenis	-	-	-	-	-	-
2 05 02 02 22	Pemeliharaan R/B Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedung	3 gedung	-	-	-	-	-	-
2 05 02 02 24	Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas/Ops	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit	5 unit	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
2 05 02 02 30	Pemeliharaan R/B Peralatan Kantor	Jumlah alat kantor yang terpelihara	-	10 unit	-	-	-	-	-	-
2 05 02 05	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR	Presentase aparatur yang mengikuti diklat	-	300 orang	-	-	-	-	-	-
2 05 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	-	11 orang	-	-	-	-	-	-
2 05 02 05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	-	300 orang	-	-	-	-	-	-
2 05 02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja	-	100%	-	-	-	-	-	-
2 05 02 06 05	Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran&Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	-	8 dokumen	-	-	-	-	-	-

2 05 02 15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan sampah	88%	30%	38%	38%	100%	-	-	-
2 05 02 15 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	22 paket	237 unit	18 unit	18 unit	100%	-	-	-
2 05 02 15 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	9 paket	9 unit	9 unit	10 unit	100%	-	-	-
2 05 02 15 07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah extrafooding untuk petugas kebersihan	238 orang	238 orang	240 orang	240 orang	100%	-	-	-
2 05 02 15 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan	720 orang	2938 orang	1200 orang	0 orang	0%	-	-	-
2 05 02 15 17	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Jumlah rekomtek pengelolaan limbah B3	35 rekomtek	-	30 ijin	90 ijin	300%	-	-	-
2 05 02 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	12,57%		4,62%	4,62%	100%	-	-	-
2 05 02 16 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan	-	83 ijin	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 22	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah pengujian kualitas air yang dilayani	230 pelanggan	190 pelanggan	240 pelanggan	140 pelanggan	58,33%	-	-	-
2 05 02 16 32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah peralatan laboratorium	-	1 dokumen mutu	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 37	Pemulihan Pencemaran Air	Jumlah dokumen rencana pemulihan pencemaran air	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 38	Pengelolaan dan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Lingkungan Hidup	Luas lahan yang direhabilitasi	-	1 Ha	-	-	-	-	-	-

2 05 02 16 39	Pembinaan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi pembinaan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup	-	3 kali koordinasi	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 40	Pengelolaan Limbah Non B3	Jumlah dokumen inventarisasi potensi limbah B3	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 41	Penanggulangan Pencemaran Air	Jumlah dokumen kajian penanggulangan pencemaran air	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 42	Pembinaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi pembinaan terhadap pemrakarsa kegiatan	-	1 kali koordinasi	-	-	-	-	-	-
2 05 02 16 43	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemrakarsa yang mengelola lingkungan	200 orang	-	50 orang	50 orang	100%	-	-	-
2 05 02 16 44	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha yang dibina	80 keg/ usaha	-	40 kegiatan/ usaha	40 kegiatan/ usaha	100%	-	-	-
2 05 02 16 45	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah luasan revegetasi lahan kritis	2 Ha	-	5 Ha	25,20 Ha	100%	-	-	-
2 05 02 19	PROGRAM PENINGK. KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 05 02 19 07	Hari Lingkungan Hidup	Jumlah peserta partisipasi Hari Lingkungan Hidup	-	2000 orang	-	-	-	-	-	-
2 05 02 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luas RTH yang dikelola	-	5,7 Ha	-	-	-	-	-	-
2 05 02 24 05	Penataan RTH	Jumlah RTH baru	-	1,5 Ha	-	-	-	-	-	-
2 05 02 24 06	Pemeliharaan RTH	Luas RTH yang terpelihara	-	80%	-	-	-	-	-	-

2 05 02 24 14	Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH	Jumlah sarana dan prasarana RTH yang terpelihara	-	40 unit	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan LH	-	93 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 01	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen RPPLH	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 02	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen KLHS	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 03	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)	Jumlah dokumen DDDT	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 04	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 05	Pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	-	86 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 25 06	Koordinasi Penyusunan Amdal	Jumlah dokumen Amdal dan kelayakan lingkungan	-	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
2 05 02 26	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	Persentase pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi yang telah memiliki ijin lingkungan	-	25,23%	-	-	-	-	-	-
2 05 02 26 01	Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah sanksi yang dikeluarkan terhadap pelanggaran penataan lingkungan	-	7 kali	-	-	-	-	-	-

2 05 02 26 02	Mediasi Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	-	15 kasus	-	-	-	-	-	-
2 05 02 26 03	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah industri yang diawasi terkait ketaatan penanggungjawab usaha	-	50 industri	-	-	-	-	-	-
2 05 02 26 04	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Jumlah industri yang mengikuti program proper	-	7 industri	-	-	-	-	-	-
2 05 02 27	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	-	3,67%	-	-	-	-	-	-
2 05 02 27 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah penghargaan yang diterima	-	1 penghargaan	-	-	-	-	-	-
2 05 02 27 02	Program Adiwiyata	Jumlah lembaga sekolah peserta Adiwiyata	-	90 sekolah	-	-	-	-	-	-
2 05 02 27 03	Pemberdayaan Kader Lingkungan	Jumlah calon kader lingkungan/ kalpataru	-	1 orang	-	-	-	-	-	-
2 05 02 28	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 28 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien)	Persentase pemenuhan sarana dan parasarna lab	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 28 02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Air)	Jumlah titik pantau air	-	9 DAS	9 DAS	9 DAS	100%	-	-	-

2 05 02 28 03	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara)	Jumlah titik pantau udara		24 kecamatan	12 titik pantau	12 titik pantau	100%	-	-	-
2 05 02 28 04	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri)	Jumlah pengujian limbah industri		199 sampel	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
2 05 02 28 05	Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir)	Jumlah sarana dan prasarana TPA baru		7 paket	5 paket	6 paket	120%	-	-	-
2 05 02 28 06	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan/ Penataan RTH)	Luas pemanfaatan RTH publik wilayah perkotaan		-	5,75 Ha	5,7 Ha	100%	-	-	-
2 05 02 31	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi perencanaan penataan lingkungan hidup yang diimplementasikan		-	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 31 01	Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan atau evaluasi lingkungan		-	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-	-
2 05 02 31 02	Kajian Dampak Lingkungan Hidup	Persentase permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang diproses		-	100%	100%	100%	-	-	-
2 05 02 31 03	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Luas pemanfaatan RTH publik wilayah perkotaan		-	5,75 Ha	5,7 Ha	100%	-	-	-

2	05	02	32		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usahadan/ atau kegiatan yang diawasi	-	-	27,75%	25,90%	93,33%	-	-	-
2	05	02	32	01	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	-	-	5 kasus	11 kasus	220%	-	-	-
2	05	02	32	02	Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penegakan hukum atas kegiatan usaha yang diawasi	-	-	50%	50%	100%	-	-	-
2	05	02	32	03	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima	-	-	3 penghargaan	1 penghargaan	33,33%	-	-	-
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen sakiip	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%
2	11	01	2.	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	01	2.	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	01	2.	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang sesuai dengan ketentuan	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	01	2.	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

2	11	01	2.06 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	01	2.07 01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
11	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	-	-	-	-	92 org/ bulan	92 org/ bulan	100%
2	11	01	2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan	100%	-	-	-	-	51 org/ bulan	51 org/ bulan	100%
2	11	01	2.03 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	01	2.04 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	100%	-	-	-	-	18 dokumen	18 dokumen	100%
2	11	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.03 02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	100%	-	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
2	11	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.09 05	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	-	-	-	-	5 orang	5 orang	100%

2	11	01	2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2. 02 06	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	11	01	2. 04 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis penyediaan bahan logistik kantor	100%	-	-	-	-	60 jenis	60 jenis	100%
2	11	01	2. 05 06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis pembelian barang cetak dan penggandaan	100%	-	-	-	-	15 jenis	15 jenis	100%
2	11	01	2. 08 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	100%	-	-	-	-	200 orang	200 orang	100%
2	11	01	2. 09 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	100%	-	-	-	-	20 laporan	20 laporan	100%
2	11	01	2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2. 05 07	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	100%	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	11	01	2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2. 02 08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	100%	-	-	-	-	40 rekening	40 rekening	100%
2	11	01	2. 04 08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	-	-	-	-	25 org/ bulan	25 org/ bulan	100%
2	11	01	2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

2	11	01	2.02 09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	100%	-	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
2	11	01	2.05 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	-	-	-	-	5 unit	5 unit	100%
2	11	01	2.06 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	-	-	-	-	5 unit	5 unit	100%
2	11	01	2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	11	01	2.10 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	02	2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen terkait RPPLH	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	02	2.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPLLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPLLH Kabupaten/ Kota	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	02	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen terkait KLHS	100%	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	11	02	2.01 02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	100%	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

2	11	02	2.	02	02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Perubahan RPJMD	100%	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	03	2.	01		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	7,43%	7,43%	100%
2	11	03	2.	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pengujian kualitas air dan kualitas udara	100%	-	-	-	-	108 dan 40 laporan	108 dan 40 laporan	100%
2	11	03	2.	03	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian kualitas air	100%	-	-	-	-	480 sampel	480 sampel	100%
2	11	03	2.	02		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang tertanggulangi	100%	-	-	-	-	47 lokasi	47 lokasi	100%
2	11	03	2.	02	01	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan LH kepada masyarakat	100%	-	-	-	-	47 lokasi	47 lokasi	100%

2	11	03	2. 03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang terpulihkan	100%	-	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	100%
2	11	03	2. 04 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	100%	-	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	100%
					Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi (metode revegetasi)	100%	-	-	-	-	1 Ha	1 Ha	100%
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	04	2. 01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase pemanfaatan keanekaragaman hayati	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	04	2. 04 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola	100%	-	-	-	-	5 Ha	5 Ha	100%
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	05	2. 01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan limbah B3 sementara yang memenuhi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

2	11	05	2.	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi scr Elektronik	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3	100%	-	-	-	-	12 ijin	12 ijin	100%
2	11	05	2.	02	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah permohonan yang terverifikasi	100%	-	-	-	-	12 ijin	12 ijin	100%
2	11	05	2.	02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah Kab/ Kota	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	05	2.	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan yang terfasilitasi	100%	-	-	-	-	3 ijin	3 ijin	100%
2	11	05	2.	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Penimbunan	Jumlah kegiatan koordinasi atau sinkronisasi yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	06	2.	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/ atau dibina	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	06	2.	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan & izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/ atau dibina	100%	-	-	-	-	20 kegiatan/ usaha	20 kegiatan/ usaha	100%
2	11	06	2.	02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan/ atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan	100%	-	-	-	-	7 perusahaan	7 perusahaan	100%

2	11	06	2.	02	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan terhadap pembinaan dan/ atau penegakan hukum	100%	-	-	-	-	7 laporan	7 laporan	100%
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	08	2.		01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kader lingkungan dan sekolah Adiwiyata	100%	-	-	-	-	7 lembaga/ sekolah	7 lembaga/ sekolah	100%
2	11	08	2.		01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	100%
2	11	08	2.		02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina	100%	-	-	-	-	6 sekolah	6 sekolah	100%
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penambahan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	09	2.		01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima	100%	-	-	-	-	2 penghargaan	2 penghargaan	100%

2	11	09	2.	01	01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan	100%	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	10	2.		01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	60%	60%	100%
2	11	10	2.		01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	1 kasus	1 kasus	100%
2	11	10	2.		02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	5 laporan	5 laporan	100%
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	11	2.		01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	100%	-	-	-	-	960 m3	960 m3	100%

2	11	11	2.02 01	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang berkurang	100%	-	-	-	-	320 ton	320 ton	100%
2	11	11	2.03 01	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang tertangani	100%	-	-	-	-	960 ton	960 ton	100%
2	11	11	2.04 01	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	100%	-	-	-	-	275 lembaga	275 lembaga	100%
2	11	11	2.05 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras	100%	-	-	-	-	24 kali	24 kali	100%
2	11	11	2.07 01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarpras di TPA	100%	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%

2	11	11	2. 02	Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase industri yang terlayani pengelolaan persampahan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
2	11	11	2. 02	02	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang berkurang	100%	-	-	-	-	3 ijin	3 ijin	100%

Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan antara tahun 2019, 2020 dan 2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait nomenklatur program dan kegiatan;
2. Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan menjalankan 12 program, 50 kegiatan yang secara rata-rata capaian tingkat realisasinya terpenuhi adalah 100%;
3. Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan menjalankan 7 program, 34 kegiatan yang secara rata-rata capaian tingkat realisasinya terpenuhi adalah 111,85%;
4. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah merubah program dan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di tahun 2021, yaitu terdiri dari 10 program, 22 kegiatan dan 52 sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program dan kegiatan, dengan beberapa capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:

Tabel 2.2. Capaian kinerja indikator (Sasaran 1)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir 2021
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,67	52,140	88,86%	63,00
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	82,25	82,22	99,96%	83,25
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	43,64	44,04	100,91%	43,66

Untuk nilai Indeks Kualitas Air (IKA) realisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena dari 55 titik sampel yang diambil untuk perhitungan nilai IKA, hanya 28 sampel yang tervalidasi (memenuhi unsur/ parameter uji) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sedangkan 27 sampel lainnya tidak memenuhi unsur/parameter uji. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target nilai IKA Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 99,96% (82,22 dari target yaitu 82,25). Capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3. Matriks Perbedaan Penyusunan IKU 2019 dengan IKU 2020

No	Uraian	IKUH 2019	IKUH 2020	REGULASI
1	Jumlah sampel uji udara	96 Titik	54 Titik	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kuantitas pada jumlah uji sampel udara. Jumlah sampel mempengaruhi hasil dari perhitungan IKU Kabupaten. Pemantauan kualitas udara yang memenuhi kaidah teknis akan memberikan gambaran nilai yang merepresentasikan kondisi sesungguhnya.

Kondisi diatas terjadi karena adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, yang mengakibatkan adanya prioritas kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan penyebaran wabah, sehingga berdampak pada *refocusing* anggaran untuk dialokasikan pada penanggulangan wabah tersebut.

Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan yaitu 101% (44,04 dari target 43,64). Tercapainya indikator kinerja ini merupakan capaian kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rehabilitasi lahan kritis berupa kegiatan revegetasi, selain 2 kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup juga mendapatkan dukungan atau partisipasi dari Perusahaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang memiliki kewajiban menanam pohon untuk mengembalikan cadangan air tanah yang diambil sebagai bahan baku produksi. Kewajiban ini tercantum didalam dokumen lingkungan perusahaan sebagai bentuk upaya pengelolaan dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan usaha dimaksud.

2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sampah diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian kinerja indikator (Sasaran 2)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir 2021
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Poin	78	79	101,28%	79

Penilaian Adipura yang menjadi agenda rutin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Survey lokasi yang menjadi agenda penilaian untuk melihat kondisi objek secara langsung tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi COVID-19.

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/ Kota yang sedianya dilakukan oleh Kementerian LHK, untuk tahun 2020 penilaiannya dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penilaian Adipura dari Kementerian LHK.

Capaian kinerja pengelolaan berhasil melampaui target yang ditetapkan, selama periode tahun 2020 lokasi tetap-tempat umum, instansi serta komponen objek penilaian lainnya mampu mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Keberhasilan capaian ini sebagai gambaran pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Pasuruan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator	SPM/Standar Provinsi	IKK	Target Renstra OPD (%)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,95 – 54,92		58,67 poin	63,00 poin	67,33 poin	71,67 poin	52,140 poin		67,33 poin	71,67 poin	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,71 – 83,90		82,25 poin	83,25 poin	83,25 poin	84,25 poin	82,22 poin		83,25 poin	84,25 poin	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	63,61 – 63,64		43,64 poin	43,66 poin	43,68 poin	43,7 poin	44,04 poin		43,68 poin	43,7 poin	
4	Nilai TPA (Program Adipura)	n/a		78 poin	79 poin	80 poin	80 poin	79 poin		80 poin	80 poin	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki target yang nilainya diatas nilai target Provinsi Jawa Timur (selisih 3,75 poin lebih tinggi). Capaian tahun 2020 lebih rendah dari target yang diajukan (88,87%), untuk target tahun 2021 – 2023 nilai capainnya cukup tinggi bila dibandingkan dengan capaian 2020, maka perlu dilakukan review terhadap nilai target 2021 – 2023.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki target yang nilainya berada pada rata-rata yang sama dengan nilai target Provinsi Jawa Timur. Capaian tahun 2020 lebih rendah dari target yang diajukan (99,96%), untuk target tahun 2021 – 2023 nilai capainnya masih bisa dicapai, sehingga untuk tahun 2021 – 2023 akan dilakukan perbaikan dalam hal pencarian nilai IKU, yang meliputi metode, jumlah sampel uji, ketelitian titik pengambilan sampel, serta yang lebih penting adalah upaya pengendalian pencemaran udara untuk peningkatan IKU di Kabupaten Pasuruan.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memiliki target yang nilainya dibawah nilai target Provinsi Jawa Timur (selisih 10 poin lebih rendah). Capaian tahun 2020 lebih tinggi dari target yang diajukan (100,92%), untuk target tahun 2021 – 2023 nilai capainnya masih bisa dicapai, sehingga untuk tahun 2021 – 2023 akan dilakukan perbaikan dalam hal identifikasi tutupan lahan secara spasial di wilayah Kab. Pasuruan, serta dengan terus menggiatkan upaya reklamasi tambang bagi pengusaha tambang di wilayah Kab.Pasuruan dan juga menginisiasi perusahaan pemakai air tanah untuk turut melakukan konservasi daerah tangkapan air dengan melakukan revegetasi yang berdampak pada peningkatan tutupan lahan.

Metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020- 2024 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN0/12/2020 tentang Perhitungan IKLH 2020- 2024 berubah menjadi:

$$IKLH \text{ Kab/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Untuk indikator Nilai TPA (Program Adipura) pada Tahun 2022 akan direviu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 yaitu menggunakan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian target dari Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai berikut:

1. Komponen penilaian terdiri dari 2 yaitu:
 - a. Indeks pengelolaan (governance);
 - b. Indeks efektivitas dan efisiensi dengan parameter input, proses, output, outcome, dan dampak.

tangkapan air serta banyaknya sumur pompa dan sumur artesis di sekitar kawasan berpengaruh terhadap meningkatnya resiko bencana kekeringan serta minimnya ketersediaan air bersih.

3. Alih Fungsi Lahan yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan penurunan ketahanan pangan;

Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pembukaan lahan terutama pada daerah lereng dengan *slope* yang besar dapat mengakibatkan dampak antara lain erosi, hilangnya tanah pucuk, berkurangnya resapan ke dalam tanah serta meningkatnya sedimentasi yang menjadi ujung pangkal terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor. Seperti halnya permasalahan alih fungsi lahan pada kawasan hutan di wilayah hulu Kabupaten Pasuruan (Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya) menjadi kawasan produktif.

Pertambangan yang dilakukan pada kawasan resapan air serta tidak memperhatikan aspek konservasi lingkungan (sebagai contoh pertambangan pasir dan batu di kawasan sekitar Ranu Grati) menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan pesisir. Pada Tahun 2008 teridentifikasi bahwa terjadi penurunan luas lahan mangrove sebesar 11% selama kurun waktu 7 tahun akibat perubahan lahan(perkapalan dan perahu, *dumping*, pertambangan, budidaya laut dan perikanan dan tambak, konversi lahan Mangrove, dan reklamasi).

Hilangnya *greenbelt* pada kawasan pantai akibat desakan kegiatan pemukiman di kawasan pesisir yang kemudian juga meningkatkan abrasi pantai di kawasan Pasuruan bagian timur (Kecamatan Lekok dan Nguling).

Dari sisi pangan, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan juga masih terus terjadi. Penurunan luas lahan sawah irigasi teknis sebesar 7% selama kurun waktu 2 tahun dari Tahun 2013 akibat alih fungsi lahan menjadi lahan pembangunan di Kabupaten Pasuruan (permukiman, industri, dan perdagangan jasa). Di sisi lain jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan meningkat 30%nya menjadi 2.190.304 jiwa pada Tahun 2049, sehingga permintaan pangan yang semakin meningkat tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan berasnya.

4. Adanya Permasalahan Sampah yang belum sepenuhnya terselesaikan;

Di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan dengan 4.707 m³/hari. Hingga saat ini hanya 10 Kecamatan yang dapat terlayani dan dikelola sampahnya. Sampah yang dikelola di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m³/hari atau sekitar 17,4 %, yang dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m³/hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m³/hari tidak dikelola.

Jumlah sampah di Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan yang efektif, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pesisir pantai.

Masalah persampahan dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks antara lain penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan.

5. Ancaman Penurunan Kualitas Udara akibat perkembangan perkotaan dan industri

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPMD, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis 2018- 2023 yang telah disusun, namun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2018- 2023.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

OPD: Dinas Lingkungan Hidup

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	11.465.010,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	10.141.264,8	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan dokumen saki	100%	122.391	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan dokumen saki	100%	9.294	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	50.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	4.221	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	844	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	844	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen DPA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen DPA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	844
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	844
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	844
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	22.391	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	853
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	9.580.455	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	9.728.494,8
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	92 org/ bln	8.088.675	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	92 org/ bln	8.387.181
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan	51 org/ bln	1.478.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan	51 org/ bln	1.339.313,8

10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DLH	Jumlah laporan akuntansi SKPD	1 dokumen	6.440	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DLH	Jumlah laporan akuntansi SKPD	1 dokumen	1.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 dokumen	6.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 dokumen	1.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan administrasi asuransi pajak barang milik daerah	100%	40.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pada barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	3.070
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLH	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	6 unit	40.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLH	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	6 unit	3.070
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	3.838
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan & pelatihan	5 orang	150.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan & pelatihan	5 orang	3.838
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	451.544,7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	51.314

14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	68.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	8.000
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jenis penyediaan bahan logistik kantor	26 jenis	45.495	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jenis penyediaan bahan logistik kantor	26 jenis	6.280
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jenis pembelian barang cetak dan penggandaan	10 jenis	47.228	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jenis pembelian barang cetak dan penggandaan	10 jenis	3.695
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah tamu yg difasilitasi	266 orang	30.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah tamu yg difasilitasi	266 orang	1.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yg dilakukan SKPD	20 laporan	260.151,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yg dilakukan SKPD	20 laporan	32.339
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	50.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	838
19	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah pengadaan mebel sesuai spesifikasi	1 unit	50.000	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah pengadaan mebel sesuai spesifikasi	1 unit	838

VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	490.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	285.275
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	40 rekening	276.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	40 rekening	270.000
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25 org/ bulan	214.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25 org/ bulan	15.275
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	580.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100%	59.141
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 unit	400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 unit	43.025

23	Pemeliharaan Mebel	DLH	Jumlah mebel yang dipelihara	37 unit	15.000	Pemeliharaan Mebel	DLH	Jumlah mebel yang dipelihara	37 unit	918
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	15.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	3.686
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	4.675
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	6.837
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan	100%	708.850	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Diimplementasikan	100%	77.480
IX	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen terkait RPPLH	2 dokumen	258.850	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase ukuran-ukuran tujuan, sasaran, dan dampak yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.	100%	69.809
27	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	2 dokumen	203.850	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan dokumen/instrumen tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan	100%	57.535

28	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH	1 laporan	55.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan dokumen/instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dalam rangka RPPLH Kabupaten yang tersusun sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku	100%	12.274	
X	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen terkait KLHS	4 dokumen	450.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen rencana program kebijakan strategis yang dianalisa dampak dan resikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100%	7.671	
29	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	4 dokumen	450.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen validasi KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	7.671	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	3.062.976,4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka penurunan beban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pasuruan	100%	404.841	

XI	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	7,43%	2.063.807,4	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan.	100%	321.456	
30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pengujian kualitas air dan udara	108 dan 40 laporan	200.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	100%	96.757	
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen desa proklam dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2 dokumen	137.901	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100%	0	
32	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengujian kualitas air	1920 sampel	1.725.906,4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan uji sampel kualitas lingkungan yang berkualitas dan terjamin mutunya	100%	224.699	

XII	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tertanggulangi	91 lokasi	405.920,6	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan.	100%	38.075
33	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat	1 lokasi	300.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Pasuruan	Persentase Pemberian informasi kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diberikan kepada pelaku pencemar dan/atau masyarakat terdampak	100%	38.075
34	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat	80 lokasi	60.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase Pengisolasian terhadap area tercemar / dan atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku	100%	0

35	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat	10 lokasi	45.920,6	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase Penghentian terhadap aktifitas/kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku.	100%	0	
XIII	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terpulihkan	55 lokasi	593.248,4	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan	100%	45.310	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar yang telah dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Unsur Pencemar		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian sumber pencemar	100%	0	

37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar yang telah dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	25 lokasi	100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembersihan unsur pencemar	100%	0	
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	25 lokasi	100.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	100%	0	
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	5 lokasi	393.248,4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	100%	45.310	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	100%	0	

D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Pasuruan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	4.719.300,5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Pasuruan	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup di Kabupaten Pasuruan	100%	541.018	
XIV	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pemanfaatan keanekaragaman hayati	100%	4.719.300,5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Peningkatan Kepedulian Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di wilayah Kab. Pasuruan.	100%	541.018	
41	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Pasuruan	-	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati Kabupaten Pasuruan	100%	0	
42	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pasuruan	Luas RTH yang dikelola	6 Ha	4.719.300,5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan	100%	541.018	

E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Pasuruan	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	90.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pengendalian B3 dan Limbah B3 dalam rangka penurunan beban pencemaran LH	100%	6.680
XV	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase Penyimpanan Limbah B3 sementara yang memenuhi	100%	90.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah dalam hal penyimpanan limbah B3 dalam rangka pengendalian B3 dan limbah B3	100%	6.680
43	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3	30 ijin	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	1.840

44	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah permohonan yang terverifikasi	30 ijin	40.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	4.840	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	348.860	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terkait ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas LH	100%	19.280	
XVI	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/atau dibina	100%	348.860	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemkab Pasuruan dalam rangka meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan	100%	19.280	

45	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan & izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/ atau dibina	20 kegiatan/ usaha	147.545	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan & izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/ atau dibina	20 kegiatan/ usaha	0
46	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengelola Lingkungan Hidup	2 orang	60.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100%	4.603
47	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan	50 perusahaan	80.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan/ atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan	8 perusahaan	9.973
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah tindak lanjut pengawasan berupa pembinaan dan/ atau penegakan hukum	50 laporan	61.315	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan terhadap pembinaan dan/ atau penegakan hukum	8 laporan	4.704

G	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Pasuruan	-	-	-	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kab. Pasuruan	100%	0	
XVII	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	-	-	-	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	0	
49	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	0	

H	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	100%	422.240,1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	100%	26.169	
XVIII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup	100%	422.240,1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	100%	26.169	
50	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Pasuruan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di tingkatkan kapasitas dan SDM bidang LH	3 lembaga	272.240,1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Pasuruan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	1 lembaga	0	
51	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Pendampingan Kegiatan Gerakan Peduli LH	1 paket	150.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah sekolah yang dibina	16 sekolah	26.169	
52	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Acara / event / kegiatan LH	-	-	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	100%	0	

I	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase penambahan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	270.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase pemberian penghargaan LH untuk masyarakat	100%	38.357
XIX	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Lembaga yang mengikuti kegiatan penghargaan LH tingkat Kabupaten	80%	270.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan LH tingkat kabupaten	100%	38.357
53	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Lembaga masyarakat, dunia usaha dan dunia Pendidikan dalam PPLH	3 kegiatan	270.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan penilaian pengelolaan lingkungan	1 kegiatan	38.357
J	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	169.182	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan penanganan pengaduan LH	80%	12.977
XX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	80%	169.182	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kab. Pasuruan	80%	12.977
54	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	5 pengaduan	95.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	3 kasus	12.977

55	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	10 laporan	74.182	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab. Pasuruan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	4 kasus	0	
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Pasuruan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	100%	19.010.229	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Pasuruan	Persentase timbulan sampah yang terkelola dengan baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas LH	100%	2.157.348	
XXI	Pengelolaan Sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA	m3	19.004.229	Pengelolaan Sampah	Kab. Pasuruan	Persentase pengelolaan sampah dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah	100%	2.157.348	

56	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen yang disusun terkait rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan	-	-	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Tersedianya dok. rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan on-site berdasarkan potensi desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan	100%	0
56	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Pasuruan	Jumlah Sampah yang berkurang	650 ton	175.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang berkurang	320 ton	1.104
57	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani	1900 ton	7.459.229,8	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani	960 ton	2.099.794

58	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	310 lembaga	1.350.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	275 lembaga	5.530
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras yg terlaksana	48 kali	50.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras yg terlaksana	24 kali	920
60	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan	1 dokumen	30.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	100%	0
61	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah terpenuhinya sarpras di TPA	1 unit	9.849.999,2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kab. Pasuruan	1 unit	50.000

XXII	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kab. Pasuruan	Persentase industri yang terlayani pengelolaan persampahan	100%	6.000	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kab. Pasuruan	Persentase pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis kegiatan usaha/ industri yg bergerak di pendaaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	100%	0	
62	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah izin/ rekomtek pengelolaan sampah	4 ijin	6.000	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah izin/ rekomtek pengelolaan sampah	25 ijin	0	
TOTAL ANGGARAN					40.266.648,7						13.425.414,8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam dan forum OPD, *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk mematangkan/memutakhirkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup, selain harus berpedoman pada Renstra yang ada, juga harus mempertimbangkan hasil Musrenbangkab/RKPD final yang mengarah pada pengembangan infrastruktur lingkungan hidup, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan serta pengembangan/ perluasan RTH.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai, yaitu :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

OPD: Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Sampah	Desa Ngadiwono Kec. Tosari	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
2	Pengelolaan Sampah	Desa Podokoyo Kec. Tosari	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
3	Pengelolaan Sampah	Desa Janjangwulung Kec. Puspo	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
4	Pengelolaan Sampah	Desa Rejosalam Kec. Pasrepan	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
5	Pengelolaan Sampah	Desa Wonosari Kec. Tuter	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
6	Pengelolaan Sampah	Desa Gendro Kec. Tuter	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
7	Pengelolaan Sampah	Desa Trewung Kec. Grati	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
8	Pengelolaan Sampah	Desa Ketegan Kec. Rejoso	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)

9	Pengelolaan Sampah	Desa Jarangan Kec. Rejoso	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
10	Pengelolaan Sampah	Desa Manikrejo Kec. Rejoso	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
11	Pengelolaan Sampah	Kel. Kolursari Kec. Bangil	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
12	Pengelolaan Sampah	Desa Masangan Kec. Bangil	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
13	Pengelolaan Sampah	Kel. Latek Kec. Bangil	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
14	Pengelolaan Sampah	Desa Jeruk Purut Kec. Gempol	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
15	Pengelolaan Sampah	Desa Kepulungan Kec. Gempol	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
16	Pengelolaan Sampah	Desa Watuagung Kec. Prigen	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
17	Pengelolaan Sampah	Desa Sumberrejo Kec. Pandaan	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
18	Pengelolaan Sampah	Desa Sebani Kec. Pandaan	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
19	Pengelolaan Sampah	Desa Bakalan Kec. Purwosari	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
20	Pengelolaan Sampah	Desa Kertosari Kec. Purwosari	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
21	Pengelolaan Sampah	Desa Pager Kec. Purwosari	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
22	Pengelolaan Sampah	Desa Pandean Kec. Rembang	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
23	Pengelolaan Sampah	Desa Tidu Kec. Pohjentrek	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
24	Pengelolaan Sampah	Desa Sungikulon Kec. Pohjentrek	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)

25	Pengelolaan Sampah	Desa Sladi Kec. Kejayan	Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	1 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Hasil Musrenbang Kecamatan)
26	Pengelolaan Sampah		Jumlah TPS/ TPS 3R yang dibangun	24 unit	Pembangunan TPS/ TPS 3R (Usulan Pokkir)
27	Pengelolaan Sampah	Desa Jogorepuh Kec. Pasrepan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
28	Pengelolaan Sampah	Desa Pohgedang Kec. Pasrepan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
29	Pengelolaan Sampah	Desa Tenggilisrejo Kec. Gondangwetan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
30	Pengelolaan Sampah	Desa Wonosari Kec. Gondangwetan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
31	Pengelolaan Sampah	Desa Sruwi Kec. Winongan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
32	Pengelolaan Sampah	Desa Trewung Kec. Grati	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
33	Pengelolaan Sampah	Desa Kawisrejo Kec. Rejoso	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
34	Pengelolaan Sampah	Kel. Bedomungal Kec. Bangil	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
35	Pengelolaan Sampah	Kel. Latek Kec. Bangil	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
36	Pengelolaan Sampah	Kel. Kalianyar Kec. Bangil	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
37	Pengelolaan Sampah	Desa Ngerong Kec. Gempol	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)

38	Pengelolaan Sampah	Desa Dawuhansengon Kec. Purwodadi	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
39	Pengelolaan Sampah	Kel. Purwosari Kec. Purwosari	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
40	Pengelolaan Sampah	Desa Sengonagung Kec. Purwosari	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
41	Pengelolaan Sampah	Desa Pajaran Kec. Rembang	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
42	Pengelolaan Sampah	Desa Lorokan Kec. Kejayan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
43	Pengelolaan Sampah	Desa Rejosari Kec. Kraton	Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	1 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Hasil Musrenbang Kecamatan)
44	Pengelolaan Sampah		Jumlah pengadaan kendaraan roda 3	89 unit	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (Roda 3) (Usulan Pokkir)
45	Pengelolaan Sampah	Desa Ngadiwono Kec. Tosari	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
46	Pengelolaan Sampah	Desa Puspo Kec. Puspo	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
47	Pengelolaan Sampah	Desa Pasrepan Kec. Pasrepan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
48	Pengelolaan Sampah	Desa Tuttur Kec. Tuttur	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
49	Pengelolaan Sampah	Desa Bayeman Kec. Gondangwetan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
50	Pengelolaan Sampah	Desa Sebalong Kec. Nguling	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)

51	Pengelolaan Sampah	Desa Sadengrejo Kec. Rejoso	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
52	Pengelolaan Sampah	Kel. Kolursari Kec. Bangil	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
53	Pengelolaan Sampah	Desa Masangan Kec. Bangil	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
54	Pengelolaan Sampah	Desa Legok Kec. Gempol	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
55	Pengelolaan Sampah	Kel. Purwosari Kec. Purwosari	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
56	Pengelolaan Sampah	Desa Sukoderma Kec. Purwosari	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
57	Pengelolaan Sampah	Desa Kalirejo Kec. Kraton	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Hasil Musrenbang Kecamatan)
58	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	2 unit	Sosialisasi Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Usulan Pokkir)
59	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	3 unit	Workshop atau Pelatihan Pelaksanaan 3R (Usulan Pokkir)
60	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Desa Klakah Kec. Pasrepan	Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Hasil Musrenbang Kecamatan)
61	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Desa Ngantungan Kec. Pasrepan	Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Hasil Musrenbang Kecamatan)
62	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Desa Jeladri Kec. Winongan	Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Hasil Musrenbang Kecamatan)

63	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Desa Sebalong Kec. Nguling	Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Hasil Musrenbang Kecamatan)
64	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Desa Jatisari Kec. Purwodadi	Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Hasil Musrenbang Kecamatan)
65	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	3 paket	Bantuan bibit tanaman keras/ buah- buahan utk Vegetasi Lahan Kritis (Usulan Pokkir)
66	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Dasar-dasar Pengelolaan Sampah (Usulan Stakeholders)
67	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Pelatihan Pemanfaatan Daur Ulang Sampah (Usulan Stakeholders)
68	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Pelatihan atau Sosialisasi di Lingkungan Perkantoran (Usulan Stakeholders)
69	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Pemberian Bibit Pohon dan Tanaman Perumahan (Usulan Stakeholders)
70	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Pelatihan Pengelolaan Sampah meliputi pembuatan kompos atau pupuk organik (Usulan Stakeholders)
71	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Bantuan Sarana Prasarana Pembentukan Bank Sampah (Usulan Stakeholders)
72	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Pemanfaatan Daur Ulang Sampah di TK-TK DWP (Usulan Stakeholders)
73	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Seminar Edukasi Lingkungan (Usulan Stakeholders)
74	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Kab. Pasuruan/ Dinas sebagai Percontohan Bank Sampah (Usulan Stakeholders)
75	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Fasilitasi distribusi produk daur ulang sampah (Usulan Stakeholders)

76	Pengelolaan Sampah		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Sosialisasi Pengelolaan Sampah untuk mendukung Program TMMD (Usulan Stakeholders)
77	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah bibit tanaman keras/ buah- buahan yang diberikan	1 paket	Bantuan bibit tanaman keras (Usulan Stakeholders)
78	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	Pembinaan pembuatan biopori (Usulan Stakeholders)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum kebijakan nasional bidang lingkungan hidup mengamanatkan untuk melakukan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Permeneg Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM bidang lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Disamping SPM bidang lingkungan hidup diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan juga melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya Pengelolaan Sampah dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di wilayah perkotaan, yaitu:

1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
3. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,33 poin
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,25 poin
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,68 poin
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Nilai TPA (program Adipura)	80 poin

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 akan dilakukan melalui 10 program, 21 kegiatan dan 47 sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2018- 2023. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan pada Tahun 2022 antara lain:

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

H. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

VI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

I. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

VII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

J. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

VIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

K. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

IX. Program Pengelolaan Persampahan

L. Kegiatan Pengelolaan Sampah:

1. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

X. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- M. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- N. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- O. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- P. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Q. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- R. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- S. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- T. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	10.141.264.762			100%	
2.11.01.2.01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen saki		100%	9.294.000			100%	
2.11.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasuruan	3 dokumen	4.221.000 Belanja Operasi : 4.221.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 4.221.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	4.643.100
2.11.01.2.01.02	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	1 dokumen	844.000 Belanja Operasi : 844.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 844.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	928.400
2.11.01.2.01.03	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	1 dokumen	844.000 Belanja Operasi : 844.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 844.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	928.400
2.11.01.2.01.04	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	1 dokumen	844.000 Belanja Operasi : 844.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 844.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	928.400
2.11.01.2.01.05	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	1 dokumen	844.000 Belanja Operasi : 844.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 844.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	928.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.01.06	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Pasuruan	1 dokumen	844.000 Belanja Operasi : 844.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 844.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	928.400
2.11.01.2.01.07	7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	1 dokumen	853.000 Belanja Operasi : 853.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 853.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	938.300
2.11.01.2.02	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	9.728.494.762			100%	
2.11.01.2.02.01	8 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	92 orang- bulan	8.387.181.000 Belanja Operasi : 8.387.181.000 - Belanja Pegawai 8.387.181.000 - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	9.225.899.100
2.11.01.2.02.02	9 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/ lapangan melalui perjanjian/ perikatan	Kab. Pasuruan	51 orang- bulan	1.339.313.762 Belanja Operasi : 1.339.313.762 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.339.313.762 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.473.245.138
2.11.01.2.02.04	10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD	Kab. Pasuruan	1 dokumen	1.000.000 Belanja Operasi : 1.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.100.000
2.11.01.2.02.07	11 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	18 dokumen	1.000.000 Belanja Operasi : 1.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.03	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pada barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	3.070.000			100%	
2.11.01.2.03.02	12 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab. Pasuruan	6 unit	3.070.000 Belanja Operasi : 3.070.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 3.070.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	3.377.000
2.11.01.2.05	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	3.838.000			100%	
2.11.01.2.05.09	13 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasuruan	5 orang	3.838.000 Belanja Operasi : 3.838.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 3.838.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	4.221.800
2.11.01.2.06	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	51.314.000			100%	
2.11.01.2.06.02	14 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	9 jenis	8.000.000 Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : 8.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	8.800.000
2.11.01.2.06.04	15 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Pasuruan	26 jenis	6.280.000 Belanja Operasi : 6.280.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 6.280.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	6.908.000
2.11.01.2.06.05	16 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	10 jenis	3.695.000 Belanja Operasi : 3.695.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 3.695.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	4.064.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.06.08	17 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kab. Pasuruan	266 orang	1.000.000 Belanja Operasi : 1.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.100.000
2.11.01.2.06.09	18 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	20 laporan	32.339.000 Belanja Operasi : 32.339.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 32.339.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	35.572.900
2.11.01.2.07	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	838.000			100%	
2.11.01.2.07.05	19 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kab. Pasuruan	1 unit	838.000 Belanja Operasi : 838.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 838.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	921.800
2.11.01.2.08	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	285.275.000			100%	
2.11.01.2.08.02	20 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	Kab. Pasuruan	40 rekening	270.000.000 Belanja Operasi : 270.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 270.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	297.000.000
2.11.01.2.08.04	21 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pasuruan	25 orang/ bulan	15.275.000 Belanja Operasi : 15.275.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 15.275.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	16.802.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.09	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah		100%	59.141.000			100%	
2.11.01.2.09.02	22 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Pasuruan	6 unit	43.025.000 Belanja Operasi : 43.025.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 43.025.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	47.327.500
2.11.01.2.09.05	23 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Pasuruan	37 unit	918.000 Belanja Operasi : 918.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 918.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.009.800
2.11.01.2.09.06	24 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pasuruan	5 unit	3.686.000 Belanja Operasi : 3.686.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 3.686.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	4.054.600
2.11.01.2.09.09	25 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit	4.675.000 Belanja Operasi : 4.675.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 4.675.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	5.142.500
2.11.01.2.09.10	26 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit	6.837.000 Belanja Operasi : 6.837.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 6.837.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	7.520.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR UP Bidang Lingkungan Hidup								
2.11.02	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Diimplementasikan	Kab. Pasuruan	100%	77.480.000			100%	
2.11.02.2.01	9 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase ukuran-ukuran tujuan, sasaran, dan dampak yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.	Kab. Pasuruan	100%	69.809.000			100%	
2.11.02.2.01.01	27 Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan dokumen/instrumen tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan	Kab. Pasuruan	100%	57.535.000	DAU		100%	63.288.500
					Belanja Operasi : 57.535.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 57.535.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.02.2.01.02	28 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen/instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dalam rangka RPPLH Kabupaten yang tersusun sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku	Kab. Pasuruan	100%	12.274.000	DAU		100%	13.501.400
					Belanja Operasi : 12.274.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 12.274.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.02.2.02	10 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen rencana program kebijakan strategis yang dianalisa dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis		100%	7.671.000			100%	
2.11.02.2.02.01	29 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen validasi KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	1 dokumen	7.671.000	DAU		1 dokumen	8.438.100
					Belanja Operasi : 7.671.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 7.671.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03	3 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka penurunan beban pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah kabupaten pasuruan	Kab. Pasuruan	100%	404.841.000			100%	
2.11.03.2.01	11 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan.	Kab. Pasuruan	100%	321.456.000			100%	
2.11.03.2.01.01	30 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pasuruan	100%	96.757.000	DAU DBHCHT		100%	106.432.700
					Belanja Operasi : 96.757.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 96.757.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.03.2.01.02	31 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	100%	-	DAU		100%	-
					Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.03.2.01.03	32 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan uji sampel kualitas lingkungan yang berkualitas dan terjamin mutunya	Kab. Pasuruan	100%	224.699.000	DAU DBHCHT		100%	247.168.900
					Belanja Operasi : 224.699.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 224.699.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03.2.02	12 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan.	Kab. Pasuruan	100%	38.075.000			100%	
2.11.03.2.02.01	33 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pemberian informasi kejadian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang diberikan kepada pelaku pencemar dan/ atau masyarakat terdampak.	Kab. Pasuruan	100%	38.075.000 Belanja Operasi : 38.075.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 38.075.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	41.882.500
2.11.03.2.02.02	34 Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengisolasian terhadap area tercemar / dan atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.03.2.02.03	35 Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penghentian terhadap aktifitas/ kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku.	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.03.2.03	13 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan			45.310.000				
2.11.03.2.03.01	36 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian sumber pencemar	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.03.2.03.02	37 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembersihan unsur pencemar	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03.2.03.03	38 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	Kab. Pasuruan	100%	-	DAU		100%	-
					Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.03.2.03.04	39 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Pasuruan	100%	45.310.000	DAU		100%	49.841.000
					Belanja Operasi : 45.310.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 45.310.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.03.2.03.05	40 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Kab. Pasuruan	100%	-	DAU		100%	-
					Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.04	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup di Kabupaten Pasuruan	Kab. Pasuruan	100%	541.018.000			100%	
2.11.04.2.01	14 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Peningkatan Kepedulian Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di wilayah Kab. Pasuruan.	Kab. Pasuruan	100%	541.018.000			100%	
2.11.04.2.01.01	41 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati Kabupaten Pasuruan	Kab. Pasuruan	100%	-	DAU		100%	-
					Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.04.2.01.04	42 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kab. Pasuruan	100%	541.018.000	DAU		100%	595.119.800
					Belanja Operasi : 41.018.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 41.018.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : 500.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.05	5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaksanaan pengendalian B3 dan Limbah B3 dalam rangka penurunan beban pencemaran LH		100%	6.680.000			100%	
2.11.05.2.01	15 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah dalam hal penyimpanan limbah B3 dalam rangka pengendalian B3 dan Limbah B3		100%	6.680.000			100%	
2.11.05.2.01.01	43 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pasuruan	100%	1.840.000 Belanja Operasi : 1.840.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 1.840.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	2.024.000
2.11.05.2.01.02	44 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Pasuruan	100%	4.840.000 Belanja Operasi : 4.840.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 4.840.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	5.324.000
2.11.06	6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terkait ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas LH		100%	19.280.000			100%	
2.11.06.2.01	17 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemkab Pasuruan dalam rangka meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan		100%	19.280.000			100%	
2.11.06.2.01.01	45 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemkab yang diawasi dan/ atau dibina		20 keg/ usaha	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.06.2.01.02	46 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	100%	4.603.000 Belanja Operasi : 4.603.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 4.603.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	5.063.300
2.11.06.2.01.03	47 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yg Izin LH, Izin PPLH yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan/ atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan	Kab. Pasuruan	8 perusahaan	9.973.000 Belanja Operasi : 9.973.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 9.973.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	10.970.300
2.11.06.2.01.04	48 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan terhadap pembinaan dan/ atau penegakan hukum	Kab. Pasuruan	8 laporan	4.704.000 Belanja Operasi : 4.704.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 4.704.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	5.174.400
2.11.07	7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kab. Pasuruan		100%	-			100%	
2.11.07.2.01	18 Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100%	-			100%	
2.11.07.2.01.01	49 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.08	8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat		100%	26.169.000			100%	
2.11.08.2.01	19 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat		100%	26.169.000			100%	
2.11.08.2.01.01	50 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kab. Pasuruan	1 lembaga	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.08.2.01.02	51 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase sekolah yang dibina	Kab. Pasuruan	16 sekolah	26.169.000 Belanja Operasi : 26.169.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 26.169.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	28.785.900
2.11.08.2.01.03	52 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.09	9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan LH untuk masyarakat		100%	38.357.000			100%	
2.11.09.2.01	20 Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan LH tingkat kabupaten		100%	38.357.000			100%	
2.11.09.2.01.01	53 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Piantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah kegiatan penilaian pengelolaan lingkungan	Kab. Pasuruan	1 kegiatan	38.357.000 Belanja Operasi : 38.357.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 38.357.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	42.192.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.10	10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan penanganan pengaduan LH		80%	12.977.000			80%	
2.11.10.2.01	21 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kab. Pasuruan		80%	12.977.000			80%	
2.11.10.2.01.01	54 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kab. Pasuruan	3 kasus	12.977.000 Belanja Operasi : 12.977.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 12.977.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		80%	14.274.700
2.11.10.2.01.02	55 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyelesaian LH di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kab. Pasuruan	4 kasus	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		80%	-
2.11.11	11 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbul sampah yang terkelola dengan baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas LH		100%	2.157.348.000			100%	
2.11.11.2.01	22 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah		100%	2.157.348.000			100%	
2.11.11.2.01.02	56 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dok. rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan on-site berdasarkan potensi desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Kab. Pasuruan	100%	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
2.11.11.2.01.02	56 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang berkurang	Kab. Pasuruan	320 ton	1.104.000 Belanja Operasi : 1.104.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 1.104.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.214.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.11.2.01.03	57 Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang tertangani	Kab. Pasuruan	960 ton	<u>2.099.794.000</u> Belanja Operasi : 99.794.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 99.794.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : 2.000.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU DAK		100%	2.309.773.400
2.11.11.2.01.04	58 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Kab. Pasuruan	275 lembaga	<u>5.530.000</u> Belanja Operasi : 5.530.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 5.530.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	6.083.000
2.11.11.2.01.05	59 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras pengelolaan persampahan	Kab. Pasuruan	24 kali	<u>920.000</u> Belanja Operasi : 920.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 920.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	1.012.000
2.11.11.2.01.06	60 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Kab. Pasuruan	100%	-	DAU		100%	-
2.11.11.2.01.07	61 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kab. Pasuruan	Kab. Pasuruan	1 unit	<u>50.000.000</u> Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : 50.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.11.2.02	23 Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yg Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis kegiatan usaha/ industri yg bergerak di pendaaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta		100%	-			100%	
2.11.11.2.02.01	62 Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/ rekomtek pengelolaan sampah	Kab. Pasuruan	25 ijin	Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : - - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		100%	-
					Belanja Operasi : 10.867.414.762 - Belanja Pegawai : 8.387.181.000 - Belanja Barang & Jasa : 2.480.233.762 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : 2.558.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
					Total Belanja PD : 13.425.414.762,00				

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran	
			Jumlah dana					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dana	4.221.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dana	844.000	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dana	844.000	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dana	844.000	Jumlah dokumen DPA SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dana	844.000	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dana	844.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dana	853.000	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	Administrasi perkantoran	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana	8.387.181.000	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	92 org-bln	Aparatur DLH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dana	1.339.313.762	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/	51 org-bln	Aparatur DLH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dana	1.000.000	Jumlah laporan akuntansi SKPD	1 dokumen	Administrasi perkantoran
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dana	1.000.000	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 dokumen	Administrasi perkantoran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dana	3.070.000	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	6 unit	Sarana dan prasarana kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dana	3.838.000	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	Aparatur DLH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dana	8.000.000	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	Sarana dan prasarana kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dana	6.280.000	Jenis penyediaan bahan logistik kantor	26 jenis	Sarana dan prasarana kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dana	3.695.000	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Sarana dan prasarana kantor
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dana	1.000.000	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	266 org	Sarana dan prasarana kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dana	32.339.000	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	20 laporan	Aparatur DLH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah dana	838.000	Jumlah pengadaan mebel	1 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dana	270.000.000	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	40 rekening	Sarana dan prasarana kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dana	15.275.000	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25 org/bin	Sarana dan prasarana kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dana	43.025.000	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 unit	Sarana dan prasarana kantor
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah dana	918.000	Jumlah mebel yang dipelihara	37 unit	Sarana dan prasarana kantor
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dana	3.686.000	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	Sarana dan prasarana kantor
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dana	4.675.000	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	Sarana dan prasarana kantor
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dana	6.837.000	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Sarana dan prasarana kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran
			Jumlah dana				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dana	57.535.000	Persentase penyusunan dokumen/instrumen tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan	100%	Masyarakat di Kab. Pasuruan
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dana	12.274.000	Persentase penyusunan dokumen/instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dalam rangka RPPLH Kabupaten yang tersusun sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku	100%	Masyarakat di Kab. Pasuruan
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dana	7.671.000	Jumlah dokumen validasi KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	Masyarakat di Kab. Pasuruan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dana	96.757.000	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100%	Masyarakat desa proklamasi di Kab. Pasuruan
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dana	224.699.000	Persentase pelaksanaan uji sampel kualitas lingkungan yang berkualitas dan terjamin mutunya	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dana	38.075.000	Persentase Pemberian informasi kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diberikan kepada pelaku pencemar dan/atau masyarakat terdampak	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dana	-	Persentase Pengisolasian terhadap area tercemar / dan atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dana	-	Persentase Penghentian terhadap aktifitas/kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku.	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian sumber pencemar	100%	Lahan kritis di Kab. Pasuruan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembersihan unsur pencemar	100%	Lahan kritis di Kab. Pasuruan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	100%	Masyarakat sekitar lahan kritis di Kab. Pasuruan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dana	45.310.000	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	100%	Masyarakat sekitar lahan kritis di Kab. Pasuruan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	100%	Masyarakat sekitar lahan kritis di Kab. Pasuruan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dana	-	Persentase penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati Kabupaten Pasuruan	100%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Jumlah dana	541.018.000	Persentase pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan	100%	RTH publik wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dana	1.840.000	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dana	4.840.000	Persentase pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dana	-	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemkab yang diawasi dan/ atau dibina	100%	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah dana	4.603.000	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100%	DLH Kab. Pasuruan
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dana	9.973.000	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan/ atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan	8 perusahaan	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dana	4.704.000	Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan terhadap pembinaan dan/ atau penegakan hukum	8 laporan	Pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kab. Pasuruan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dana	-	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	1 lembaga	Masyarakat di Kab. Pasuruan
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dana	26.169.000	Persentase sekolah yang dibina	16 sekolah	Masyarakat di Kab. Pasuruan
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah dana	-	Persentase penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	100%	Masyarakat di Kab. Pasuruan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dana	38.357.000	Jumlah kegiatan penilaian pengelolaan lingkungan	100%	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi di Kab. Pasuruan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dana	12.977.000	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	3 kasus	Pelaku usaha/ kegiatan, masyarakat dan aparaturn pemerintah di Kab. Pasuruan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dana	-	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	4 kasus	Pelaku usaha/ kegiatan, masyarakat dan aparaturn pemerintah di Kab. Pasuruan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	MASUKAN (input)		KELUARAN (output)		Kelompok Sasaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dana	-	Tersedianya dok. rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan on-site berdasarkan potensi desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan	100%	DLH Kab. Pasuruan	
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah dana	1.104.000	Jumlah sampah yang berkurang	320 ton	Masyarakat di Kab. Pasuruan	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah dana	2.099.794.000	Jumlah sampah yang tertangani	960 ton	Masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah dana	5.530.000	Jumlah bank sampah yang terbentuk	275 lembaga	Masyarakat (bank sampah) dan pengelola TPS 3R di Kab. Pasuruan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dana	920.000	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras pengelolaan persampahan	24 kali	DLH Kab. Pasuruan	
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dana	-	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	100%	DLH Kab. Pasuruan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah dana	50.000.000	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kab. Pasuruan	1 unit	DLH Kab. Pasuruan	
		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dana	-	Jumlah izin/ rekomtek pengelolaan sampah	100%	Masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan di Kab. Pasuruan
		TOTAL				13.425.414.762		

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diantaranya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi hambatan. Rencana Kerja ini memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan, kecamatan dan usulan dari *stakeholder* serta dari Dinas Lingkungan Hidup agar program kegiatan dapat terintegrasi dengan baik.

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2022 maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65.556.235.212,- (enam puluh lima milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program rutin/ penunjang
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp 10.141.264.762,-
- b. Program Utama
 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp 77.480.000,-
 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 404.841.000,-
 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Rp 541.018.000,-
 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Rp 6.680.000,-

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Rp 19.280.000,-
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp 26.169.000,-
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp 38.357.000,-
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Rp 12.977.000,-
10. Program Pengelolaan Persampahan Rp 2.157.348.000,-

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai pelaksana dalam hal kewenangan di bidang urusan wajib lingkungan hidup. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan menganalisis faktor pendorong atau penghambat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat pada capaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu dilakukan peningkatan kuantitas pada jumlah uji sampel udara karena jumlah sampel sangat mempengaruhi hasil perhitungan IKU Kabupaten dalam pemantauan kualitas udara yang memenuhi kaidah teknis sehingga dapat memberikan gambaran nilai yang mempresentasikan kondisi kualitas udara yang sesungguhnya.
2. Untuk penentuan target Indeks Kualitas Air (IKA) perlu dilakukan review karena realisasi pada Tahun 2020 belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Titik sampel yang diambil untuk perhitungan nilai IKA perlu ditingkatkan agar dapat tervalidasi (memenuhi unsur/ parameter uji) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
3. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. 318/PPKL/SET/REN/.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020- 2024, rumus perhitungan IKLH mengalami perubahan sehingga target IKLH Kabupaten Pasuruan perlu di review.

Demikian Renja Tahun 2022 ini disusun tentu masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, terdapat juga kemungkinan ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang sebenarnya, oleh karena itu perbaikan dan penyesuaian harus dilakukan agar renja ini dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pasuruan, Juni 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

ttd.

HERU FARIANTO, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199201 1 001

Dokumen RENJA (Rencana Kerja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, disusun berpedoman kepada dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2023 serta dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF